

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah hal yang penting dihadapi suatu negara, karena kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupannya. Orang dapat dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-harinya. Masalah kemiskinan dapat dipicu oleh masih banyaknya orang yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang hidup di dalam garis kemiskinan, dimana orang tidak dapat mencukupi sandang pangan dan papan untuk kebutuhan hidup. Dari hal tersebut kemiskinan diadakan di bawah garis kemiskinan (Moniyana & Pratama,2021).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dimana dalam melakukan suatu pembangunan perekonomian terdapat isu yang belum teratasi baik itu di berbagai negara yang berkembang maupun negara maju sekalipun. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih terus menjadi topik pembicaraan di berbagai wilayah negara yang terkena dampak masalah ekonomi di daerah itu tersendiri. Upaya pemerintah telah dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan umum salah satunya mengarah ke berbagai kegiatan pembangunan daerah khususnya daerah-daerah pedalaman yang masih kurang terjangkau oleh pemerintah sehingga tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah, kegiatan pembangunan ini harus tepat pada sasaran, karena pada dasarnya indikator dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu berawal dari keberhasilan dalam membangun pembangunan nasional salah satunya

dengan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pemerintah dalam melakukan upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, dan langkah lainnya (Teja, 2015) dalam Nida Khairotunnisa, (2023). Menurut Tambunan (2019) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat dan laju pertumbuhan, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum seperti pendidikan dasar, kesehatan, transportasi, listrik, air, dan lokasi pemukiman, kultur budaya, politik, dan bencana alam.

Pemulihan ekonomi suatu negara berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Semakin banyak penduduk miskin di wilayah tersebut maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, begitupun sebaliknya semakin sedikit jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut semakin sejahtera.

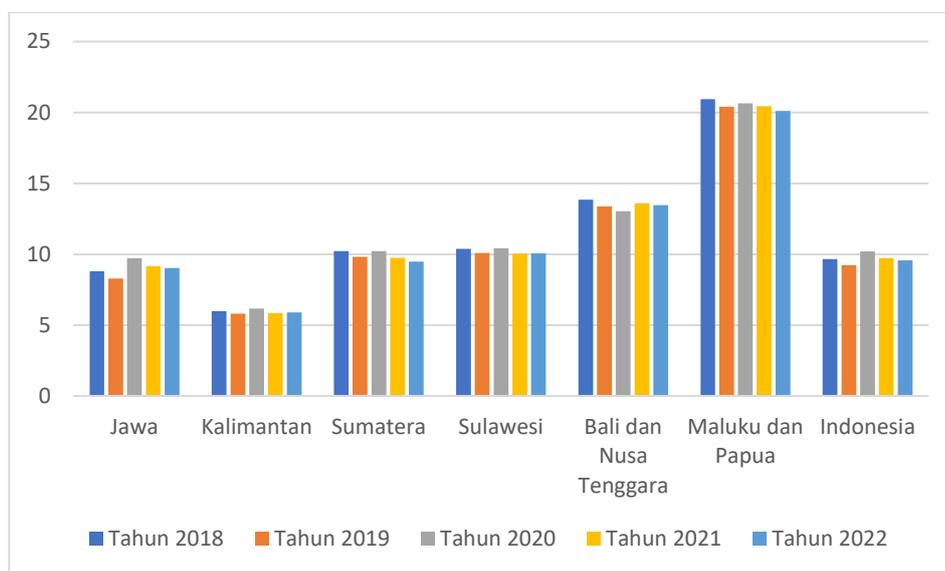
Fenomena kemiskinan menjadi problematika pada perkembangan ekonomi nasional khususnya dihadapi oleh negara yang berkembang, salah satunya Indonesia. Di tengah padatnya jumlah penduduk, kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi baik kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2019 mencapai 24,79 juta orang atau sebesar 9,22 persen (BPS, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia sebagai masalah yang berkelanjutan hingga menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam program pembangunan nasional Indonesia. Menurut Rusdarti

(2017) kemiskinan merupakan persoalan klasik yang dialami semenjak awal mula adanya umat manusia dan seiring berjalannya waktu menjadi persoalan global sehingga kemiskinan sebagai hal pokok untuk segera diatasi.

Kemiskinan sebagai persoalan yang cukup pelik dan berdampak pada beraneka ragam bidang kehidupan manusia sehingga usaha dalam memecahkan masalah kemiskinan menjadi sulit. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti: Tabungan Keluarga Sejahtera (Takestra), Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya. Namun upaya-upaya tersebut belum berhasil sebagaimana yang diinginkan (Remi, et al., 2002); dalam (Della Rahma, 2019) Kemiskinan bukan hanya diartikan sebagai ketidakberdayaan ekonomi, namun juga ketidakberhasilan dalam pemenuhan hak-hak pokok dan diskriminasi kepada individu maupun kelompok dalam menjalankan kehidupan yang berkualitas. Hak-hak yang dimaksud diantaranya terwujudnya kebutuhan konsumsi, tempat tinggal, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, terlindungi dari ancaman perbuatan kekerasan, dan ikut serta dalam hidup bersosial dan politik. Oleh karena itu kemiskinan dapat berakibat munculnya berbagai macam persoalan sosial dan berimbas pada proses pembangunan ekonomi suatu negara (Sukmaraga, 2011).

Masalah kemiskinan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, melainkan masalah yang dapat merambat ke setiap daerah diseluruh wilayah di Indonesia. Kemiskinan di setiap wilayah di Indonesia pastinya sangat berbeda-beda. Berikut dibawah ini jumlah penduduk miskin menurut pulau-pulau di Indonesia dari tahun

2018 sampai 2022. Kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2018 sebesar 9,66%, tahun 2020 lebih meningkat lagi sebesar 10,19% hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi sebesar 9,57% dibandingkan tahun 2020, selain pengangguran Covid-19 juga menjadi salah satu faktor terlambatnya proses pembangunan di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1.1 **Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 5 tahun terakhir**

Berdasarkan pada gambar 1.1 terlihat dengan jelas bahwa tingkat kemiskinan di beberapa Pulau Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan perbedaan signifikan dalam tren kemiskinan di berbagai wilayah. Maluku dan Papua dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara semua pulau, pada tahun 2018 menunjukkan penurunan lambat 20,94% turun ditahun 2022 menjadi 20,10%, hal ini menjadi tantangan kemiskinan yang berkelanjutan. Nusa Tenggara, yang juga memiliki nilai persentase tinggi sebesar 13,84% pada 2018 dan mengalami

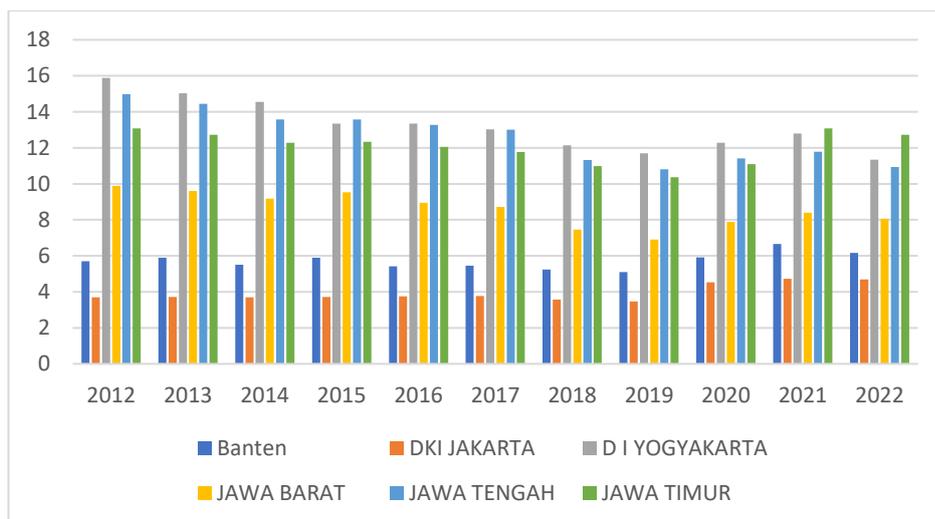
penurunan sementara menjadi 13,46% pada 2022, juga mencerminkan ketidakstabilan dalam perbaikan kondisi kemiskinan.

Sulawesi menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif stabil namun meningkat secara bertahap, dari 10,37% pada 2018 menjadi 10,06% pada 2022, hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, Sumatera mengalami kenaikan kemiskinan sebesar 10,21% pada 2018 menurun menjadi 9,47% di tahun 2022, menunjukkan tren negatif yang mirip dengan pulau lain.

Pulau Jawa menduduki tingkat kemiskinan tertinggi ke lima di Indonesia tahun 2018 dengan persentase 8,79% naik dan cenderung berfluktuasi di tahun 2022 sebesar 9,03%, masih terbilang cukup tinggi dan beberapa belum stabil Jawa berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara perlahan dalam hal ini adanya sedikit upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kalimantan, dengan tingkat kemiskinan terendah di antara pulau-pulau lain, tetap relatif stabil meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 5,98% pada 2018 turun menjadi 5,09% pada 2022, menandakan kondisi kemiskinan yang lebih terkelola. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan disparitas yang jelas dalam tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan beberapa pulau menunjukkan upaya proses perbaikan yang efektif, sementara yang lain masih menghadapi tantangan signifikan.

Pulau Jawa merupakan wilayah sentral Indonesia yang menjadi pusat perekonomian dan banyak tercipta lapangan pekerjaan. Meskipun Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian di Indonesia, namun permasalahan kemiskinan di Pulau Jawa masih sangat krusial yang hingga masih dalam proses upaya

mengentaskan kemiskinan. Pulau Jawa sampai yang saat ini masih menjadi pulau yang mengalami kemiskinan cukup tinggi. Lebih dari separuh penduduk miskin berada di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan padatnya penduduk di Pulau Jawa dan kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Jawa masih cukup tinggi (Ridzky Giovanni, 2018). Pulau Jawa meliputi enam provinsi besar diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Kemiskinan yang terjadi pada masing-masing provinsi pastinya berbeda. Berikut dibawah ini gambaran penduduk miskin di enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2012 sampai 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, (diolah)

Gambar 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2012-2022
(Persen)

Dapat dilihat dari Gambar 1.2 diatas bahwa dari tiap-tiap Provinsi di Pulau Jawa cenderung sedikit mengalami penurunan di setiap tahunnya walaupun terdapat pola yang berfluktuasi pada tingkat penduduk miskin. Berdasarkan data BPS tahun 2022 secara lebih rinci persentase penduduk miskin di Pulau Jawa paling banyak

yaitu ada di wilayah perkotaan dan pedesaan sebesar 7,65% dan 11,94%. Pada tahun 2012 ada 3 Provinsi dengan Tingkat persentase Kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa diantaranya Provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. D.I Yogyakarta merupakan Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 15,88% disusul oleh Provinsi Jawa Tengah kedua sebesar 14,98% dan ketiga Jawa Timur sebesar 13,08%. Adapun Provinsi dengan Persentase penduduk miskin terendah diantara provinsi-provinsi yang lain di Pulau Jawa adalah Provinsi Dki Jakarta dengan jumlah persentase 3,70%, Banten sebesar 5,71% dan Jawa Barat 9,88%.

Kemudian di tahun 2013-2018 Tingkat Kemiskinan masih belum menunjukkan adanya kestabilan masih terus mengalami kenaikan maupun penurunan meskipun sedikit terjadi penurunan tetapi belum adanya perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang lumayan cukup besar 2,35% tetapi di tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan kembali ini dikarenakan adanya Covid-19 sehingga menyebabkan angka kemiskinan meningkat kembali. Dan tahun 2022 mengalami penurunan kembali tetapi masih dibawah yang diharapkan oleh pemerintah dan dalam tahap yang kurang stabil dan belum menunjukkan adanya perubahan yang baik untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Meskipun pulau jawa dengan penghuni lebih dari separuh total penduduk indonesia dengan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional terbesar tetapi, saat terjadinya pandemi covid-19 awal tahun 2020 di indonesia jumlah penambahan terbesar disumbang oleh jawa hampir 2,2 juta orang atau 53,55 persen dari total nasional, kemiskinan naik tiga

persen. Di pulau lain angka kemiskinan juga bertambah, tetapi tidak signifikan sehingga angkanya justru menurun akibat adanya kenaikan yang sangat signifikan di pulau Jawa (Gianie, 2022).

Penyebab kemiskinan meningkat karena pembangunan di pulau Jawa tidak merata hal ini terjadi kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Kemiskinan meningkat juga diakibatkan oleh jumlah penduduk pada era pandemi meningkat di Pulau Jawa dari tahun ke tahun semakin bertambah sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit sehingga banyak yang menganggur karena banyak perusahaan yang sulit memberi upah karyawan ini dikarenakan pendapatan menurun sehingga harus secara paksa untuk memutus hubungan kerja (PHK) para karyawannya dan kemiskinan meningkat.

Kemiskinan dipengaruhi oleh sulitnya akses layanan dasar secara umum, kurangnya fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, pola pikir dengan mementingkan upacara adat dan mengorbankan kebutuhan pendidikan serta gizi yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia, pola pikir yang tidak berkembang mempengaruhi produktivitas masyarakat (Bappenas, 2018). Permasalahan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa menjadi penting karena, presentase penduduk miskin di Pulau Jawa secara umum mengalami penurunan, namun dari tahun ke tahun masih memiliki angka yang relatif tinggi. Sehingga pengembangan ekonomi di Pulau Jawa harus lebih inklusif dengan memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal dari sumber daya alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin.

Perbedaan jumlah kabupaten/kota ke enam provinsi di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya ketidakmerataan persentase penduduk miskin. Ketimpangan antara jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kemiskinan (Hambarsai & Inggit, 2016).

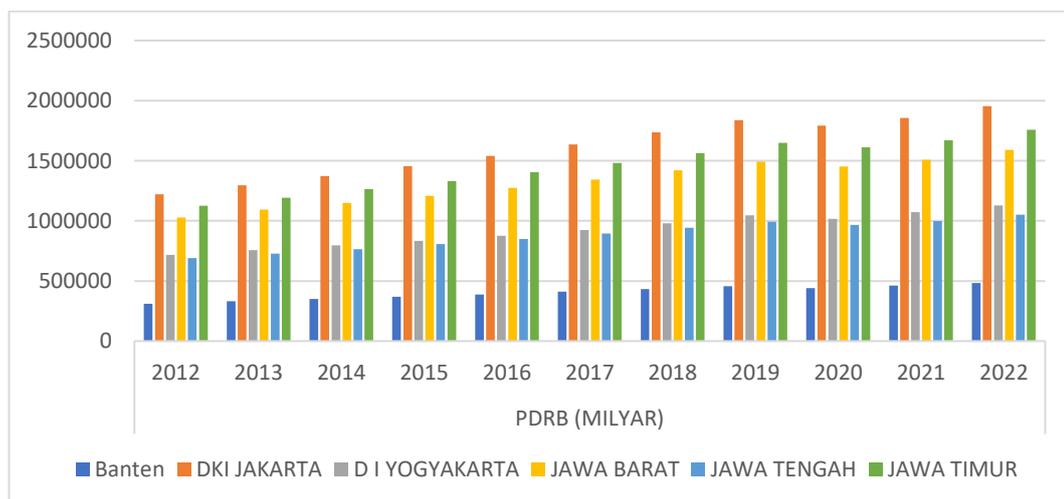
Kemiskinan di wilayah pulau Jawa walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung lambat. Lambatnya penurunan tersebut menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami sekitar 30 juta penduduk di Indonesia masih sangat kronis, hingga akhirnya mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Strategi pembangunan ekonomi memiliki sasaran pertama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kinerja perekonomian secara keseluruhan dapat dilihat salah satunya melalui Produk Domestik Bruto (PDRB). Teori neo klasik memberikan penjelasan bahwa PDRB adalah tolak ukur bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Faritz & Soejoto, 2020).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dapat melihat kemajuan atau kemunduran kegiatan perekonomian pada kurun waktu tertentu. Kemajuan atau kemunduran pertumbuhan ekonomi dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Ketika jumlah barang dan jasa bertambah artinya kemakmuran masyarakat juga akan bertambah. (Prasetyo, 2020).

Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah memiliki peranan penting untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pokok atau kunci yang digunakan oleh pemerintah dalam menurunkan

angka penduduk miskin dan digunakan sebagai tolak ukur untuk mencerminkan program pembangunan ekonomi (Faritz & Soejoto, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi mampu menciptakan pemerataan dalam segala sektor yang berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan (Himawan, 2016) dalam (Nooren, 2023). Menurut Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit yang ada dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto terdiri dari dua macam yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut dibawah ini gambar grafik pertumbuhan ekonomi di enam provinsi wilayah Pulau Jawa:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1.3
Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Tahun 2012-2022 (Milyar)

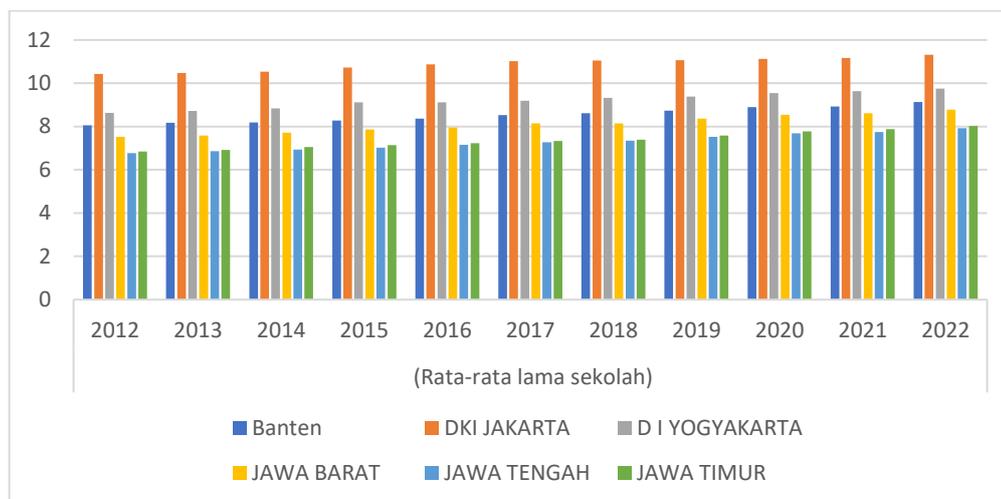
Dari Grafik 1.3 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa atas dasar harga konstan 2010 setiap tahunnya mengalami pola yang cenderung meningkat, akan tetapi terdapat juga pola yang bersifat fluktuatif terutama di beberapa Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Produk Domestik Regional Bruto tertinggi pada tahun 2022 berada pada 3 terdiri dari Provinsi Dki Jakarta sebesar 1.953.465 milyar rupiah Jawa Timur 1.757.821 milyar rupiah, dan Jawa Barat sebesar 1.589.985 milyar rupiah. Sedangkan tingkat PDRB terendah berada pada Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 310.386 milyar rupiah.

Pengentasan kemiskinan juga dapat dilihat melalui aspek pembentukan sumber daya manusia yang dilihat dari pendidikan yang sangat berdampak pada peningkatan produktifitas seseorang. Dimana produktifitas seseorang sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Pembangunan suatu negara memiliki dua aspek utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Seseorang dengan pendidikan tinggi dan kesehatan fisik yang mendukung akan mudah beradaptasi dengan teknologi yang baru, berbeda dengan seseorang berpendidikan rendah dan kesehatan yang mungkin kurang mendukung akan kesulitan beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Produktivitas akan berdampak pada perolehan pendapatan yang akan diterima oleh orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Aji et al., 2020).

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh (Becker, 1964) dalam (Amin, 2022) memberikan penjelasan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan mendapatkan upah yang layak sehingga mampu terhidar dari masalah kemiskinan.

Menurut BPS (2021) Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada IPM metode baru cara untuk mengukur pendidikan dilihat melalui harapan dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan seseorang terhadap pendidikan normal yang pernah dijalani. Pendidikan dan status pekerjaan kepala keluarga menjadi penentu suatu rumah tangga lolos dari jerat kemiskinan.

Dari data BPS tahun 2021 terlihat bahwa rumah tangga miskin di Indonesia bercirikan kepala rumah tangga yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan hanya sampai lulus sekolah dasar (67,6 persen). Sebanyak empat dari sepuluh yang miskin tersebut bahkan tidak tamat SD. Namun, terdapat 1,81 persen rumah tangga miskin yang kepala keluarganya adalah lulusan perguruan tinggi. Angka ini bertambah dari sebelumnya hanya 1,44 persen pada Maret 2020. Betapa pandemi juga membuat kalangan berpendidikan tinggi tidak memiliki kehidupan yang layak. Sementara berdasarkan status pekerjaan, kepala keluarga dari rumah tangga miskin dominan bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya mencapai 51,33 persen. Sementara dari 12,9 persen rumah tangga miskin, kepala keluarganya tidak bekerja alias penganggur. Berikut merupakan grafik Rata-rata Lama Sekolah provinsi di Pulau Jawa.



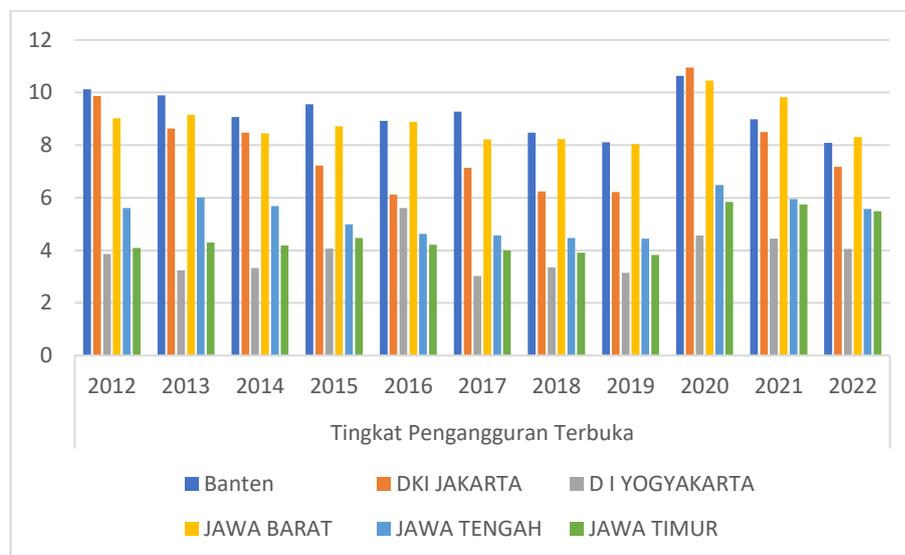
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1.4
Rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa Tahun 2012-2022 (Persen)

Dari gambar 1.4 diatas dapat diketahui bahwa pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah sepanjang tahun 2012 sampai 2022 di enam provinsi di Pulau Jawa meningkat setiap tahunnya. Peningkatan lama sekolah di Pulau Jawa disebabkan oleh salah satunya program pemerintah yaitu wajib belajar serta terdapat berbagai bantuan untuk setiap tingkat pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bahkan bantuan berupa bidikmisi untuk jenjang perguruan tinggi. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata lama sekolah tertinggi di pulau jawa sekaligus tertinggi nasional dengan persentase lama sekolah 11.31% pada tahun 2022. Sementara itu, rata-rata lama sekolah terendah ditempati Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,93% di tahun 2022. Meskipun pendidikan di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun ada beberapa provinsi dengan capaian lama sekolah di bawah 9 tahun, diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang masing-masing sebesar 7,93 persen tahun , 8,03 persen tahun, 8,78 persen , dan 9,13 pesen tahun pada tahun 2022. Hal

ini dapat terjadi diakibatkan oleh masalah ekonomi atau kurangnya biaya untuk sekolah. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih untuk bekerja walaupun upah yang diterima rendah karena dirasa pendidikan tidaklah penting. Perkembangan rata-rata lama sekolah sangatlah lambat. Rendahnya rata-rata lama sekolah memberikan dampak pada pembatasan pengembangan diri akibat kualitas pendidikan yang rendah sehingga produktivitas rendah dan diikuti oleh sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga memicu meningkatnya kemiskinan di Pulau Jawa (Fauziah et al., 2019).

Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah juga bisa disebabkan oleh pengangguran. Jika tingkat pengangguran tinggi dan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, hal itu akan membuat tingkat kemiskinan tinggi. Ketika banyak penduduk di suatu daerah tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak, hal itu akan mengakibatkan kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut karena penduduknya tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di suatu daerah haruslah rendah agar tingkat kemiskinan juga rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2012-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar grafik 1.5 diatas menunjukkan nilai persentase tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa dari tahun 2012-2022. Tahun 2012 sampai 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi ada di Provinsi Banten, Dki Jakarta, Jawa Barat dan terendah ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta. Pada tahun 2020 dan 2021 pengangguran meningkat di Dki Jakarta sebesar 10,95% yang merupakan kenaikan tertinggi selama 8 tahun terakhir, dan tahun 2021 Jawa Barat menjadi urutan pertama pengangguran tertinggi sebesar 9,82%.

Selanjutnya pada tahun 2021-2022 TPT di beberapa provinsi wilayah Jawa mengalami penurunan walaupun masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan dan upaya pemerintah di tiap-tiap provinsi pulau Jawa dalam menangani masalah pengangguran selama periode tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah pengendalian laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan masyarakat yang rendah. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi apabila diikuti pula dengan tingginya tingkat pengangguran. Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, baik berupa perampokan, pencurian maupun perdagangan ilegal. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, minimal kebutuhan pokok (Rezki Mardiatillah, 2021).

Sejak munculnya Pandemi covid-19 atau disebut dengan virus corona telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pandemi muncul pertama kali di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut WHO, (2020) covid-19 merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh virus jenis baru yang di sebut dengan SARS-CoV-2. Penyakit yang menyebar diantara orang-orang sekitar melalui sistem pernafasan dari batuk, bersin, hidung tidak bisa

mencium bau dan lidah tidak bisa mengecap. Pandemi tersebut telah mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional dan global secara serius sejak awal tahun 2020.

Pada tanggal 3 November 2020, secara kumulatif penduduk dunia yang terinfeksi virus tersebut mencapai 46 juta jiwa dengan jumlah kematian mencapai 1,2 juta jiwa (WHO, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyebaran covid relatif tinggi di Asia. Hingga Juni 2021, tercatat 1.856.038 kasus positif covid yang membuat Indonesia berada pada peringkat pertama jumlah penduduk terinfeksi virus tersebut.

Dalam hal kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak dengan 51.612 orang meninggal. Penyebaran covid yang relatif cepat mendorong pemerintah mengambil sejumlah kebijakan guna memutus mata rantai virus tersebut. Adanya himbauan pemerintah agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan melakukan social distancing, membatasi perjalanan antar daerah, hingga munculnya peraturan yang berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran covid guna melindungi masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran virus tersebut yang kemudian diiringi dengan sejumlah kebijakan di atas telah berdampak buruk bagi perekonomian.

Kegiatan ekonomi di sektor tertentu seperti transportasi dan perdagangan mengalami penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat, dikarenakan adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama di daerah perkotaan. Hingga Agustus 2020 rata-rata tingkat pengangguran 34 provinsi

di Indonesia sebesar 6,03%, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode Februari tahun yang sama sebesar 4,46%. Kondisi tersebut tentunya dapat berpengaruh pada indikator makro ekonomi lainnya seperti kemiskinan dan distribusi pendapatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Dummy Covid-19 di Pulau Jawa dengan tidak hanya menganalisis hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Dummy Covid-19 terhadap Kemiskinan saja, tetapi dengan menambah variabel baru yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dalam hal ini penelitian ini peneliti merasa tertarik dengan variabel baru yakni Covid-19 yang masih belum banyak yang meneliti tentang topik tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Periode 2012-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Covid-19 secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2022?

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan indikasi masalah diatas, maka tujuan dri penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Covid-19 secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2022.
2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Covid-19 secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2022.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu

Untuk pengembangan ilmu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan serta dapat menjadi pedoman dalam penelitian dengan tema yang serupa dengan mengganti variabel atau menambahkan variabel baru untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan tentang topik yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi, dengan harapan bisa menerapkan hasil tersebut secara efektif dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah atau instansi terkait diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan terkait untuk mengatasi tingkat kemiskinan khususnya di wilayah Pulau Jawa sebagai masalah serius yang harus segera diatasi untuk perkembangan suatu perekonomian di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia dengan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) melalui situs www.bps.go.id atau *website* BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) beberapa Provinsi di Pulau Jawa Indonesia dilakukan secara deskriptif dalam kajian pustaka yaitu dengan data yang digunakan merupakan data sekunder, data panel pada periode 2012-2022.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2023, diawali dengan pengajuan judul. Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

